

**DAMPAK DESENTRALISASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA  
PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

Sri Rosmawati<sup>1</sup>

***Abstract***

*This study aims to determine the effect of Construction Cost Index, Relative Poverty Index and Human Development Index for Fiscal Needs and to determine the relationship between the fiscal capacity of revenue sharing fund (DBH) and local revenue (PAD), The method used is the multiple regression analysis 2001-2011 and Pearson correlation test was conducted to determine the relationship between Needs Fiscal and Fiscal Capacity in personnel expenditures. In this study, it is found that the Construction Cost Index and relative poverty index negatively effect on Fiscal Needs, Human Development Index positive effect on Fiscal Needs, Pearson correlation of test results are known DBH positively and significantly associated with a P value or Sig 0,000 and Locally Generated Revenue positive and significant with a P value Fiscal Capacity sig 0.033 or less than 0.05. Fiscal Needs and Fiscal Capacity positively associated with personnel expenditures and significant with a P value or Sig 0.000 or less than 0.05.*

*Key words: fiscal capacity, fiscal needs, fiscal, personnel expenditure, Revenue Sharing Fund (DBH), and Local Revenue (PAD).*

**PENDAHULUAN**

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selain itu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal nasional.

Alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah secara garis besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah. Sedangkan kebutuhan fiskal mencerminkan total pengeluaran yang dibutuhkan suatu daerah dalam melaksanakan aktivitas daerahnya.

Kabupaten Tebo, yang merupakan kabupaten pemekaran, dalam pengelolaan keuangan daerahnya memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pengalokasian belanja daerah adalah dalam rangka untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan propinsi atau

---

<sup>1</sup> Dosen STIE Graha Karya Muara Bulian

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Sementara itu, pengklasifikasian belanja daerah secara ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Besarnya belanja pegawai, terutama pada gaji PNSD, membuat tiap-tiap pemerintah daerah harus mengalokasikan dana, karena belanja pegawai bersifat mengikat yang artinya dibutuhkan secara terus menerus dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Modal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi semakin berkurang. Kontribusi DAU yang tinggi juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya.

Berdasarkan Penjelasan PP No 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam.

Tim Departemen Keuangan RI (2001) membangun penghitungan alokasi DAU tahun anggaran 2002 dengan menggunakan Indeks Kemiskinan Relatif sebagai salah satu variabel dalam penghitungan Kebutuhan Fiskal. Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan bagian dari komponen Kebutuhan Fiskal yang berkaitan dengan Kemampuan pengelolaan keuangan dan pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi bagian yang juga penting untuk mengukur kemajuan suatu daerah.

Keberhasilan suatu daerah dalam membangun infrastruktur bagi kelancaran mobilisasi kebutuhan masyarakat juga sangat diharapkan. Dengan infrastruktur yang memadai kesulitan dalam menjangkau suatu daerah menjadi berkurang. Tingkat Kemahalan Konstruksi ikut diperhitungkan pada Kebutuhan Fiskal karena mencerminkan tingkat harga konstruksi yang dibutuhkan dalam menyediakan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dipandang perlu karena keadaan dan tingkat kesulitan geografis di setiap daerah berbeda-beda.

Kabupaten Tebo yang merupakan kabupaten pemekaran, masih terus melakukan pembenahan baik dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan terus diupayakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna mengurangi celah fiskal yang terjadi.

Dari pertimbangan diatas, perumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah; (1) Bagaimana pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo. (2) Bagaimana hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tebo. Serta hubungan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.

Tujuan dari penelitian ini adalah :(1) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo. (2) Untuk mengetahui hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas Fiskal serta hubungan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.

### **Hipotesis**

Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal di kabupaten Tebo. (2) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhubungan positif dengan Kapasitas Fiskal serta Kebutuhan dan Kapasitas fiskal berhubungan positif dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah dipublikasikan oleh masyarakat pengguna data. Analisis data sekunder dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan, meliputi APBD, Tebo Dalam Angka dan Data Kepegawaian Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tebo, Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui browsing internet.

#### **Metode Analisis Uji Hipotesa Pertama**

Dalam penelitian ini, diasumsikan *intercept* dan kelandaian fungsi adalah sama baik antar unit analisis maupun antar waktu. Dengan asumsi ini model regresi yang akan ditaksir berbentuk sebagai berikut (Sumodiningrat, 2007):

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 X + \dots + \alpha_k X + u$$

Dengan demikian model ekonometrika untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan fiskal menggunakan formula model Log-lin :

$$\ln FN = \alpha_0 + \alpha_1 IKK + \alpha_2 IKR + \alpha_3 IPM + e$$

Keterangan;

- FN = Kebutuhan Fiskal
- IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
- IKR = Indeks Kemiskinan Relatif
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- $\alpha$  = Parameter
- $e$  = Error Term

#### **Uji Statistik**

Hasil regresi yang diestimasi diharapkan besaran dan tanda(arah koefisien) sesuai dengan teori ekonomi dan atas dasar apriori yaitu bertanda positif (+), dan selanjutnya dilakukan uji statistik berupa uji t dan uji F. Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik

suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: Normalitas, Linearitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heterokedastisitas.

### **Metode Analisis Uji Hipotesa Kedua**

Untuk menguji hipotesa kedua yaitu menghitung besaran nilai hubungan antara Dana Bagi Hasil dengan Kapasitas Fiskal serta hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal. Menghitung besaran nilai hubungan antara Kebutuhan Fiskal dengan Belanja Pegawai serta hubungan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai, digunakan alat uji Korelasi sederhana Pearson. Korelasi Pearson, diformulasikan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)} \sqrt{(n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dimana:

- $r_{xy}$  = nilai korelasi antara  $x_i$  dengan  $y_i$
- $n$  = jumlah periode
- $x_i$  = Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah  
= Kebutuhan Fiskal atau Kapasitas Fiskal
- $y$  = Kapasitas Fiskal  
= Belanja Pegawai

Besarnya koefisien korelasi ( $r$ ) antara dua buah variabel ( $y$  dan  $x$ ) adalah nol sampai  $\pm 1$ . Apabila dua buah variabel ( $y$  dan  $x$ ) mempunyai nilai  $r=0$  berarti variabel-variabel tersebut tidak ada hubungan. Apabila variabel-variabel itu mempunyai  $r= \pm 1$ , maka kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan yang sempurna. Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel  $X$  dengan  $Y$  (variabel bebas dan terikat),

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo.**

Analisis Kebutuhan Fiskal untuk melihat pengaruh indeks kemahalan konstruksi, indeks kemiskinan relative dan indeks pembangunan manusia dengan regresi berganda. Dengan menggunakan aplikasi program *evIEWS 6*, hasil estimasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Variabel	koefisien	t-Statistik	Prob.
C	-1.198845	-1.031266	0.3367
IKK	-0.000106	-0.250940	0.8091
IKR	-0.329439	-5.435371	0.0010
IPM	0.389551	24.32556	0.0000
F- Hitung	625.0997		
R <sup>2</sup>	0.996281		

Sumber: Diolah dari data primer

Variabel terikat (dependen variabel) adalah Kebutuhan Fiskal (Y). Dan variabel bebasnya adalah IKK, IKR, IPM (X). Sehingga persamaan regresi berganda, yang dapat ditulis adalah:  $\text{LnFN} = -1.198845 - 0.000106 \text{ IKK} - 0.329439 \text{ IKR} + 0.389551 \text{ IPM} + e$

Persamaan diatas menunjukkan, pada saat Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia dianggap konstan atau tidak ada perubahan maka Kebutuhan Fiskal akan menurun sebesar 1,2 persen. Koefisien regresi IKK -0.000106 menunjukkan setiap kenaikan IKK akan menurunkan Kebutuhan Fiskal sebesar 0.01 persen. Koefisien regresi IKR - 0.329439 menunjukkan setiap kenaikan IKR akan menurunkan Kebutuhan Fiskal sebesar 32.94 persen. Demikian juga dengan Koefisien IPM 0.389551 menunjukkan setiap kenaikan IPM akan menaikkan Kebutuhan Fiskal sebesar 38.95 persen.

Dari analisis uji simultan (Uji F-statistik), dengan df sebesar (3,7)  $\alpha = 0,05$  diperoleh F-tabel sebesar 4,35 sedangkan F-hitung sebesar 625.0997 menunjukkan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif, Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama mempengaruhi Kebutuhan Fiskal.

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan tingkat signifikansi ( $\alpha = 5$  persen) dan tingkat kepercayaan 95 persen, diperoleh t-tabel 2.365. Indeks Kemahalan Konstruksi diketahui (t-hit=-0.250940 dan t-tab= 2.365) tidak berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal. Indeks Kemiskinan Relatif (t-hit= - 5.435371 t-tab= 2.365) berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal. Indeks Pembangunan Manusia (t-hit= 24.32556 t-tab= 2.365) berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal. Dari uji-t diketahui bahwa secara parsial Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal.

Dengan R Square ( $R^2$ ) sebesar 0.996281 menunjukkan bahwa variasi perubahan Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif, Indeks Pembangunan Manusia mampu menjelaskan perubahan Kebutuhan Fiskal sebesar 99,62 persen sedangkan sisanya sebesar 0,38 persen dipengaruhi oleh variasi perubahan lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

R Square yang tinggi mengindikasikan adanya koleniaritas diantara variabel bebas. Akan tetapi model yang mengandung koleniaritas masih bisa digunakan jika hanya untuk membuat suatu ramalan saja. Sebab untuk keperluan meramal, yang penting adalah menganalisis keseluruhan model dan tidak individual parameter.

Indeks Kemahalan Konstruksi merupakan komponen dari Kebutuhan Fiskal yang mempunyai hubungan negatif terhadap Kebutuhan Fiskal hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya angka Indeks Kemahalan Konstruksi maka akan menurunkan Kebutuhan Fiskal dan sebaliknya.

Pada dasarnya tujuan dilakukannya penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kesulitan geografis. Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Kabupaten Tebo, dengan luas 646.100 Ha atau 11.86 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Topografi Kabupaten Tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Dengan kondisi wilayah seperti ini daerah Kabupaten Tebo

relatif mudah untuk di jangkau. Namun letaknya yang jauh dari ibukota propinsi membuat Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Tebo berada di urutan ketiga dari sebelas Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi pada tahun 2010 dengan angka indeks 92,37. Pengaruh negatif yang disebabkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi menyebabkan penurunan Kebutuhan Fiskal tidak begitu berarti yaitu sebesar 0.01 %. Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tebo secara parsial juga tidak signifikan.

Acuan penghitungan Kebutuhan Fiskal yang didasarkan pada agregat pengeluaran mencakup jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan publik. Indeks Kemiskinan Relatif mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan semakin tinggi angka indeks kemiskinan relatif maka akan menurunkan Kebutuhan Fiskal. Pada kenyataannya adalah semakin tinggi Indeks Kemiskinan Relatif maka akan meningkatkan Kebutuhan Fiskal. Karena dengan semakin tingginya angka kemiskinan berarti dana yang dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan juga semakin meningkat. Hasil penghitungan ternyata bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya. Dugaan yang dapat dikemukakan adalah Kebutuhan Fiskal tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin yang harus dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Tetapi lebih kepada peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik sarana, prasarana dan pelayanan sosial lainnya.

#### **Hubungan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal di Kabupaten Tebo.**

Kapasitas fiskal daerah merupakan cerminan kemampuan keuangan suatu daerah yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam perolehan Dana Alokasi Umum. Dalam penelitian ini data kapasitas fiskal yang digunakan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk menghitung besaran nilai hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah dengan Kapasitas Fiskal digunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil dari SPSS.19 untuk uji korelasi Pearson diperoleh :

<b>Correlations</b>				
		Kf	dbh	pad
Kf	Pearson Correlation	1	.893**	.642*
	Sig. (2-tailed)		.000	.033
	N	11	11	11
dbh	Pearson Correlation	.893**	1	.626*
	Sig. (2-tailed)	.000		.039
	N	11	11	11
pad	Pearson Correlation	.642*	.626*	1
	Sig. (2-tailed)	.033	.039	
	N	11	11	11

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel Dana Bagi Hasil (X1) dengan Kapasitas Fiskal (Y) adalah sebesar 0.893. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil akan diikuti secara positif oleh

Kapasitas Fiskal sebesar 89,3 persen . Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).

Korelasi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) dengan Kapasitas Fiskal (Y) adalah sebesar 0,642 dengan arah positif. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah akan diikuti secara positif oleh Kapasitas Fiskal sebesar 64.2 persen. Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0,033 (3.3%) lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0.05 (5%).

### **Hubungan kebutuhan dan kapasitas fiskal dengan belanja pegawai di Kabupaten Tebo.**

Untuk menghitung besaran nilai hubungan antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal dengan Belanja Pegawai, digunakan alat uji Korelasi Pearson. Hasil estimasi dari SPSS.19 untuk uji korelasi Pearson diperoleh:

		Correlations		
		bp	fn	kf
bp	Pearson Correlation	1	.992**	.960**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	11	11	11
fn	Pearson Correlation	.992**	1	.987**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	11	11	11
kf	Pearson Correlation	.960**	.987**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	11	11	11

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel Kebutuhan Fiskal (X1) dengan Belanja Pegawai (Y) adalah sebesar 0.992 Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada Kebutuhan Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai sebesar 99,2 persen . Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 (5%).

Korelasi antara variabel Kapasitas Fiskal (X2) dengan Belanja Pegawai (Y) adalah sebesar 0,960 dengan arah positif. Hal ini berarti setiap perubahan yang terjadi pada Kapasitas Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai 96 persen. Hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan karena nilai P atau Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 0.05 (5%).

### **Implikasi Kebijakan**

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kebutuhan Fiskal di Kabupaten Tebo. Indeks Kemahalan Konstruksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan Indeks Kemiskinan Relatif berpengaruh negatif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin bertambah tingkat Indeks kedua variabel tersebut akan menurunkan Kebutuhan Fiskal, demikian pula sebaliknya.

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara positif signifikan menunjukkan setiap peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia akan diikuti

dengan peningkatan Kebutuhan Fiskal. Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu tolok ukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, dimana keberhasilan pembangunan manusia menunjukkan kualitas dari sumber daya manusianya. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang hidup sehat dan panjang umur, memiliki pendidikan dan kecakapan hidup yang berguna bagi kehidupan masyarakatnya, serta dapat mencapai standar hidup yang layak. Indeks Kemiskinan Relatif yang harus terus di turunkan menunjukkan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dari suatu daerah menunjukkan semakin meratanya pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh suatu daerah, sehingga penyaluran bahan-bahan kebutuhan masyarakat dapat dicapai dengan lebih mudah.

Penggunaan variabel IKK dan IPM dalam Kebutuhan Fiskal mendorong pemekaran daerah, karena kedua variabel tersebut secara relatif akan sama antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Hal ini berbeda dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, ketika suatu daerah dimekarkan, maka total kedua variabel tersebut akan terbagi antara daerah induk dan pemekaran.

Terlepas dari semua itu, Pemerintah Kabupaten Tebo, harus terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil agar kemandirian daerah seperti yang diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Daerah dan memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Indonesia, serta untuk mendukung stabilitas makroekonomi (Sidik & Kadjatmiko, 2004) dapat tercapai.

Proporsi PAD Kabupaten Tebo terhadap Total Pendapatan sangat kecil. Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah. Intensifikasi pajak daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemungutan dan efisiensi administrasi pajak, serta perbaikan kontrol terhadap petugas untuk meminimalkan kebocoran. Upaya dan strategi tersebut sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk dapat mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil PAD. Misalnya dengan strategi Bonus bagi orang/instansi yang melampaui target yang telah ditetapkan, memberikan Sanksi yang tegas, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh internal petugas dan atau wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih baik dititik beratkan pada intensifikasi sumber-sumber Pos Retribusi Daerah, mengingat retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Sedangkan pajak-pajak daerah dapat ditetapkan secara terbatas pada obyek pajak yang potensial, sehingga akan tercapai target yang telah ditetapkan.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola usaha-usaha ekonomi yang memungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil, salah satunya adalah dengan meningkatkan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Tebo, dapat melakukan kontrol bagi perusahaan penambang tentang jenis dan hasil tambang, Meningkatkan pendataan perusahaan penambang, Peningkatan penerimaan dari sektor kehutanan yang merupakan Dana Reboisasi, Provisi Perlu dipertimbangkan untuk menarik pungutan guna mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam.

### **SIMPULAN**

1. Hasil analisis pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Kemiskinan Relatif dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan, Indeks Kemiskinan Relatif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebutuhan Fiskal.
2. Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kapasitas Fiskal adalah positif dan signifikan yang berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah akan diikuti secara positif oleh Kapasitas Fiskal.
3. Hubungan kebutuhan dan kapasitas fiskal dengan belanja pegawai di Kabupaten Tebo adalah positif dan signifikan yang berarti bahwa setiap perubahan yang terjadi pada Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal akan diikuti secara positif oleh Belanja Pegawai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, L.(1997), *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Baharsyah, S.(1992), *Prospek Pembangunan Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta
- Bastian, I.(2006), *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Basri, M dan Subri, (2003), *Keuangan Negara dan Desentralisasi Fiskal*, LPEM, FE-UI, Jakarta
- Depdagri, (2004), *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*
- Depdagri, (2004), *Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Depdagri, (2005), *Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*
- Departemen Keuangan RI, (2006), *Tinjauan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*
- Gill, R. T., (1983), *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gujarati, D. (1995), *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Rajawali Press, Jakarta
- Halim, A dan Igbal, (2012), *Bunga Rampai Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Hendra, R,( 2010) *Determinasi Kemiskinan*, FE UI, Jakarta
- Jhingan, L, (1996), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, RajawaliPress, Jakarta
- Kuncoro, M . (2000), *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta
- Kuncoro, M. (2009), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Kuncoro, M .(2004), *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Musgrave, RA dan Musgrave, PB, (1991), *Public Finance In Theory and Practice*, Terjemahan Erlangga, Jakarta
- Mangkusoebroto, G.(1991), *Ekonomi Publik*, Badan Penerbit FE- UGM, Yogyakarta
- Mardiasmo, (2000), *Otonomi dan Keuangan Daerah*, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Mahmudi, (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta

- Nachrowi,D& Usman H, (2008) *Penggunaan Teknik Ekonometrik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rodianto, B.(2012), *Analisis Determinasi Alokasi Anggaran dan Struktur Belanja Pegawai Pada Kabupaten Bungo*,Tesis
- Roflin, E(2007), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umumdi Propinsi Sumatera Selatan*, *Kajian Ekonomi* vol.6 No.2
- Samuelson, (1995), *Ilmu Ekonomi*, Terjemahan Erlangga, Erlangga, Jakarta
- Sidik, M.(1999), *Otonomi dan Desentralisasi Fiskal* , FE-UGM, Yogyakarta
- Soeparmoko, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, BP FE-UGM, Yogyakarta
- Sugiyono, (2011), *Statistik Nonparametris*, Alfabeta, Bandung
- Sumodiningrat, G.(2007), *Ekonometrika Pengantar*, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Sunyoto,D. (2013), *Analisis Data Ekonomi Dengan Menggunakan SPSS*, Indeks, Jakarta
- Syaukani,H.,Gaffar,A.,& Rasyid,M.R.(2002).*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- TADF, 2012, *Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant*.Tim Asistensi Desentralisasi Fiskl Kementrian Keuangan
- Todaro, MP, (1983), *Ekonomi Pembangunan di Negara Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wijaya, F.(1990), *Ekonomia Makro*, LP FE-UI, Jakarta
- Widodo,A. dkk, (2011), *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah*, UnDip, Semarang
- Yani, U.dkk, (2002), *Perekonomian Indonesia, Krisis dan Strategi Alternatif*, Pustaka Cidesindo, Jakarta